

**PERNYATAAN SIKAP
SERIKAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (SPRI)**

**SUAP BANSOS COVID-19 MENYENGSARAKAN RAKYAT MISKIN KOTA;
UBAH BANSOS SEMBAKO DENGAN TUNAI !**

Dalam kondisi tanpa pandemi sekalipun, rakyat miskin di Indonesia telah mengalami berbagai kesulitan. Kondisi pandemi telah menambah beban dan kesulitan yang harus ditanggung oleh rakyat miskin menjadi berkali-kali lipat. Banyak rakyat kecil terimbas oleh krisis ekonomi dan kehilangan mata pencahariannya, dan karena itulah rakyat miskin membutuhkan peran pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini.

Ironisnya, para pemangku kebijakan justru memanfaatkan situasi krisis ini untuk memperkaya diri. Kasus suap senilai Rp 17 milyar dalam pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang melibatkan Menteri Sosial telah merugikan negara dan menyengsarakan warga miskin kota di Jabodetabek. Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa, karena hak orang miskin untuk menerima bansos telah dicuri untuk memuaskan keserakahan Pejabat Negara. Padahal dalam situasi krisis, orang miskin merupakan kelompok yang paling terdampak karena kehilangan pekerjaan dan sangat membutuhkan bantuan sosial negara.

Kasus suap pengadaan bantuan sosial ini terjadi karena memanfaatkan peluang keadaan darurat dalam pengadaan barang/jasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No 13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat, pengadaan dapat dilakukan tanpa proses tender atau cukup dengan cara swakelola dan penyedia. Proses pengadaan yang tertutup menjadi ajang pembajakan hak Rakyat miskin kota terhadap bantuan sosial.

Padahal menurut surat edaran LKPP No 20/2020 seluruh pengadaan darurat terkait Covid-19 harus dipublikasikan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun dari hasil penelusuran website LPSE, tidak ada publikasi terkait pengadaan sembako Kemensos, tidak dipublikasikan dalam website ini.

Bansos berupa barang sangat tidak efektif & tidak kontributif untuk membantu daya hidup keluarga miskin. Berdasarkan tiga kali hasil monitoring yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Bansos Jakarta dalam Periode April, Mei dan Juni 2020 menunjukkan nilai bantuan sangat kecil, barang habis dengan cepat, barang yang diberikan tidak sehat & tidak meningkatkan daya tahan tubuh, banyak praktek memecah bantuan supaya bagi rata. Hasil monitoring juga menunjukkan bahwa warga miskin Jakarta lebih menginginkan bantuan langsung tunai dibandingkan bantuan sembako.

Alokasi pembelanjaan anggaran khusus penanganan Covid-19 tidak terbuka sehingga publik kesulitan untuk turut mengawasi prosesnya dari hulu ke hilir. Masyarakat hanya bisa mengawasi praktik distribusi di lapangan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan anggaran darurat terkait Covid-19 menjadi ajang bancakan para pejabat Negara. Meskipun kementerian keuangan telah mengeluarkan aturan PMK No. 103/PMK.05/2020 yang mengatur pengelolaan rekening khusus covid-19, namun sampai saat ini data anggaran

tersebut tidak dipublikasikan. Perlu aturan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka informasi program & anggaran covid secara rinci ke publik luas.

Oleh karenanya **Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)** menyatakan sikap:

1. Hukum seberat-beratnya Koruptor Bansos Covid-19. Usut tuntas Korupsi Bansos dari Pusat hingga Desa/ Kampung.
2. Ganti bansos sembako dengan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui transfer antar bank seperti yang dilakukan bansos lainnya.
3. Buka dan umumkan alokasi pembelanjaaan anggaran Bansos Covid 19. Serta libatkan rakyat dalam penetapan data penerima manfaat.
4. Merancang ulang skema perlindungan sosial nasional yang lebih responsif, adil dan bermanfaat ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga miskin.

PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !

Jakarta, 7 Desember 2020

Mengetahui,

Marlo Sitompul (Ketua Umum)

Dika Moehammad (Sekjen)

Narahubung

0819.0898.6987 (Dika Moehammad)